

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ancel, Mark, 2001, *Social Defense: A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Paul Ltd, London
- Abdulkadir, Muhammad., 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- A.Z Abdidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Chibro, Soufnir. 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dimiyati, Johni., 2013, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Hartiwiningsih dan Lushiana Primasari, 2017, *Hukum Pidana Ekonomi (edisi kesatu)*, Universitas Terbuka, Banten
- Hamzah, Andi., 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- . 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- . 1995, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentarnya edisi kedelapan*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta
- Hamzah, Andi, Dkk., 2006, *Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi hukum Tentang: Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- L.J van Apeldoorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan: Oetarid Sadino*, Pradnya Paramita, Jakarta

- Mahmud Marzuki, Peter,. 2008, *Penelitian Hukum Edisi Cetakan Keempat*, Kencana, Jakarta
- Marpaung, Leden. 1992, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- . 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Penerapannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP seri : Penyidikan Dan Penuntutan* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta
- Rinwigati Patricia. "Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis?", Parliamentary Brief: Series #6, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta
- Supriyanta, 2010, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Unisiri Press, Solo
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D edisi ke-3*, Alfabeta, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum* Edisi Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Suharsmi, Arikunto. 2014, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Yoserwan dan Nani Mulyati, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi*, Rajawali Press, Depok

## **B. Jurnal**

- Abiyoha Daffa,dkk, *Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia*, Juenal Penelitian Hukum, Vol. 1, No.1, 2021
- Amad Sudiro, "Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi Di Bidang Perbankan," *Era Hukum*, Vol. 9, No. 3, 1996
- Barama Michael, *Denda Damai Menurut Pasal 29 Rechten Ordonantie*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.

Daffa Abiyoga, Ivan Taffarel A, dan Donny Arjun, “Studi Pemetaan Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 1, 2021

Iswari, Fauzi dan Azriadi, “Tindak Pidana Ekonomi Serta Pengaturannya Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Volume 01, No. 01, Januari 2022

Mamengko, Johana F.R., “Denda Damai Dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi”, *Lex Crimen*, Vol.I, No.1, 2012

Merianto, Ryan. “Tindak Pidana Penyeludupan sebagai Delik Ekonomi”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No.8, 2015

Mudzakkir, Jakarta, “Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Makalah Workshop*, 18 Januari 2007

Nasution, Eva Syahfitri. “Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyeludupan di Indonesia”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, No.1, 2015.

Remaja, Nyoman Gede. ”Makna hukum dan kepastian hukum”, Kertha Widya (2014), Vol.2, No.1

Ritonga, Rolando, ”Manifestasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penerapan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi Guna Mengubah Tataan Sosial Masyarakat”, *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No.2, 2023.

Sadino dan Bella Nurul Hidayati, ”Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. II, No. 1, 2017

Sofiana, Rina. ”Upaya penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan”, *Lex Crimen* (2020), Vol.8, No. 9, hlm. 13-19

Sudirja, Rudi Prasetya, “Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu”, *Jurnal Litigasi*, 2019

Syahputra, Azmi, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2013

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang  
Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat  
atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  
Perpajakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang  
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 698,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang  
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67)

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33)

**D. Internet**

Annisa. "Pengertian Tindak Pidana Khusus Beserta Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/>, diakses pada tanggal 10 September 2024

Barama, Michael. "Denda Damai Menurut Pasal 29 Rechten Ordonantie", Karya Ilmiah Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Manado, 2011

Dialog. "Kejati DKI Hanya Menghukum Denda Rp4,8 Miliar: Kasus Penyelundupan Minyak Goreng Dihentikan", <https://hariandialog.co.id/2023/06/13/kejati-dki-hanya-menghukum-denda-rp-48-miliar-kasus-penyeludupan-minyak-goreng-dihentikan/>, diakses pada tanggal 8 September 2024

Djuhriyadi, Mohamad, "Kasus Migor, Kajati DKI: Uang Denda Damai Rp4.8 M akan disetor ke Kas Negara", <https://independensi.com/2023/07/15/kasus-migor-kajati-dki-uang-denda-damai-rp48-m-akan-disetor-ke-kas-negara/>. Diakses pada 26 November 2023

Loqman, Loebby, "Hukum Pidana di Bidang Perekonomian", <http://library.stik-ptik.ac.id/>, diakses pada tanggal 26 November 2023

Mantovani, Reda, "Penerapan Asas Dominus Litis dalam UU KPK", <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-asas-dominis-litis-dalam-uu-kpk-lt5ddf8ba3bb064/>, diakses tanggal 24 Oktober 2023

Ramadhan, Nediyanto. "Mediasi Penal dalam Integrated Criminal Justice System", Karya Ilmiah, diakses pada tanggal 7 September 2024

Sitompul, Shalih Mangara, "Telaah Implementasi Denda Damai Dalam Perspektif Dominus Litis", <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-implementasi-denda-damai-dalam-perspektif-dominus-litis-lt64b10b4676c26/>. Diakses pada tanggal 26 November 2023

Sudirdja, Rudi Pradisetia, "Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil dan Militer," *Bahasan.id*, last modified 2020, <https://bahasan.id/satu-komando-penuntutan-untuk-sipil-dan-militer>

Sutiawan, Iwan. "Kejati DKI Serahkan Kasus Ekspor Minyak Goreng PT AMJ dkk ke Bea Cukai", <https://www.gatra.com/news-540293-hukum->

kejati-dki-serahkan-kasus-ekspor-minyak-goreng-pt-amj-dkk-ke-bea-  
cukai.html, diakses pada tanggal 8 September 2024

Wicaksono, Kurniawan Agung. "Apa itu konsolidasi Fiskal?",  
[https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/35063/apa-itu-konsolidasi-  
fiskal](https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/35063/apa-itu-konsolidasi-fiskal), diakses pada tanggal 9 September 2024